

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PETA RISIKO

TAHUN 2026

Dokumen Manajemen Risiko dalam rangka
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan Penguatan Tata Kelola Organisasi



IDENTIFIKASI
RISIKO



ANALISIS
RISIKO



EVALUASI
RISIKO



PENGENDALIAN
RISIKO



PEMANTAUAN
DAN TINDAK LANJUT

📍 Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang 30129
Provinsi Sumatera Selatan

2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Fungsi
 - Penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak
 - Pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia
 - Pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain
 - Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
 - Perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak
 - Pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak
 - Pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran komposit yang menggambarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: 1.Kesehatan reproduksi, 2. Pemberdayaan, dan 3. Partisipasi dalam pasar tenaga kerja.	$IKG = 1 - \frac{G_f}{G_m}$ Keterangan: - IKG = Indeks Ketimpangan Gender - Gf = Indeks gabungan untuk perempuan - Gm = Indeks gabungan untuk laki-laki - Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1 - Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan gender - Nilai mendekati 1 berarti ketimpangan gender tinggi	BPS	DPPPA
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. □	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$ Keterangan: - IPG = Indeks Pembangunan Gender - IPM = Indeks Pembangunan Manusia	BPS	DPPPA
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total jumlah perempuan usia kerja	$TPAK_P = \frac{AKP}{UP} \times 100\%$ % Keterangan: - TPAK, P = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan - AKP = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan - UP = Jumlah Perempuan Usia Kerja - Total Anggaran: keseluruhan anggaran dalam satu unit kerja, program, atau periode tertentu.	BPS	DPPPA
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat upaya dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.	$IPA = \frac{\sum (Skor \; tiap \; indikator)}{Jumlah \; indikator}$ Atau dalam bentuk agregat: $IPA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ dengan: - X_i = nilai (indeks indikator ke-i (yang telah dinormalisasi), - n = jumlah indikator yang digunakan.	KemenPPPA dan BPS	DPPPA
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	Perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah berhasil diselesaikan (melalui penanganan, mediasi, pendampingan) dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang selesai terlayani dibagi total kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100	UPTD PPA Prov. Sumsel	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	Perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah berhasil diselesaikan (melalui penanganan, mediasi, pendampingan) dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.	Jumlah kasus kekerasan anak yang selesai terlayani dibagi total kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	UPTD PPA Prov. Sumsel	DPPPA

Palembang, November 2025
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, AP.,M.Si
 Pembina Utama Madya, (IV/d)
 NIP. 197306261993111001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS PP PA

Nama Pemda	Provinsi Sumatera Selatan		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang dinilai	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025 - 2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak		
Penetapan Konteks Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak		
Sasaran Strategis	1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		
	1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		
	1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		
Penetapan Konteks Sasaran Strategis	1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		
	1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		
	1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		
IKU Resntra OPD	IKU		2026
	1.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.453
	1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.99 - 94.10
	1.3	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	57.30
	2.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.00
	3.1	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100
	3.2	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100
	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	2	Program Perlindungan Perempuan	
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
	5	Program Pemenuhan Hak Anak	
	6	Program Perlindungan Khusus Anak	
Penetapan Konteks Program	1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
	2 Program Perlindungan Perempuan		
	3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
	4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
	5 Program Pemenuhan Hak Anak		
	6 Program Perlindungan Khusus Anak		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan	1	Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
		Sasaran Strategi	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
	IKU	1.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		1.3	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan
	Penilaian risiko	Program	1
		2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

	2	Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
		Sasaran Strategi	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
		IKU	2.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Program	1	Program Pemenuhan Hak Anak
		2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	3	Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
		Sasaran Strategi	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
		IKU	3.1 Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan
			3.2 Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan
	Program	1	Program Perlindungan Perempuan
		2	Program Perlindungan Khusus Anak
	Palembang, 2026		
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan		

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Pemda	Provinsi Sumatera Selatan	
Tahun Penilaian	2026	
Periode yang dinilai	2026	
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
OPD yang dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sumber Data	Renja/RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2026	
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	
Program Dinas PPPA (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	2	Program Perlindungan Perempuan
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	5	Program Pemenuhan Hak Anak
	6	Program Perlindungan Khusus Anak
Penetapan Konteks Program ,Kegiatan,Sub Kegiatan	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
	1.1.1	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
	1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
	1.2.1	Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
	1.2.2	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
	1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	1.3.1	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
	1.3.2	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
	2	Program Perlindungan Perempuan
	2.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
	2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.2.1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.2.2	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	3.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	3.1.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
	3.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	3.2.1	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
	4.1.1	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA
	4.1.2	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
	5	Program Pemenuhan Hak Anak
	5.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
	5.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi
	5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

	5.2.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		
	6	Program Perlindungan Khusus Anak	
	6.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	6.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
	6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
	6.2.1	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	6.2.2	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah	
	6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	6.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
Penetapan Konteks Keluaran/Hasil Kegiatan Sub Kegiatan	1.1.1	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	43 OPD
	1.2.1	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang
	1.2.2	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang
	1.3.1	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	20 Lembaga
	1.3.2	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 LPLPP
	2.1.1	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	10 Lembaga
	2.2.1	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang
	2.2.2	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang
	2.3.1	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang
	3.1.1	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	17 Lembaga
	3.2.1	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang
	4.1.1	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen
	4.1.2	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen
	5.1.1	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	31 Lembaga
	5.2.1	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan
	6.1.1	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	40 Lembaga

		6.2.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota50 Orang					
		6.2.2 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota50 Orang					
		6.3.1 jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus200 Orang					
Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Keluaran/ Hasil dilakukan penilaian risiko	1	Progr					
	1.1	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
		1.1.1	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				
	1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi					
		1.2.2	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				
	2	Program Perlindungan Perempuan					
	2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan					
		2.2.1	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	5	Program Pemenuhan Hak Anak					
	5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan					
		5.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi				
	6	Program Perlindungan Khusus Anak					
	6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan					
		6.2.1	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan					

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategi
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel
2026
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dam
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		
	Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak								
1	Sasaran Strategi : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	IKG dan IPG	PPRG tidak diterapkan secara konsisten	RSO.26. 08.12.01	DPPPA	Pemahaman OPD rendah, komitmen pimpinan bervariasi	Internal	C	Program tidak responsif gender, target PUG tidak tercapai
			Data terpilah tidak tersedia/ tidak mutakhir	RSO.26. 08.12.02	DPPPA	Sistem Data belum terintegrasi	Internal	C	Analisis gender tidak akurat
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Akses perempuan ke lapangan kerja formal rendah	RSO.26. 08.12.03	Masyarakat	Diskriminasi gender; minim kebijakan ramah perempuan	Internal/Eksternal	UC	Perempuan sulit terserap pasar kerja
			Akses perempuan ke modal usaha terbatas	RSO.26. 08.12.04	Masyarakat	Kurangnya pendampingan pasca pelatihan kerja dan Persyaratan perbankan; lemahnya kemitraan	Eksternal	C	Hasil proram tidak berkelanjutan
2	Sasaran Strategi : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator KLA tidak tercapai	RSO.25. 08.12.05	DPPPA	Koordinasi OPD belum optimal	Internal	C	Predikat KLA menurun
			Forum Anak tidak berfungsi optimal	RSO.25. 08.12.06	DPPPA	Pembinaan terbatas	Internal	C	Aspirasi anak tidak terserap
3	Sasaran Strategi : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Kasus tidak tertangani sesuai standar layanan	RSO.26. 08.12.07	DPPPA	SDM terbatas, koordinasi lemah	Internal dan Eksternal	C	Korban tidak terlindungi optimal
			Korban enggan melapor	RSO.26. 08.12.08	DPPPA	Stigma, minim sosialisasi	Internal dan Eksternal	UC	Kasus tersembunyi
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Layanan rehabilitasi ABH tidak optimal	RSO.25. 08.12.09	DPPPA	Keterbatasan layanan lanjutan	Internal dan Eksternal	UC	Anak berisiko residivisme
			Kasus tidak teridentifikasi	RSO.25. 08.12.10	DPPPA	Deteksi dini lemah	Internal dan Eksternal	UC	Anak tidak tertangani

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

pak
Pihak yang Terkena
Kepala Daerah /Kepala Dinas PP PA/Masyarakat
OPD, perencana
Masyarakat
Masyarakat
Kepala Daerah /Kepala Dinas PP PA/Anak
Anak
Kepala Daerah/Kepala Dinas PP PA/Masyarakat/ Korban
Kepala Daerah /Kepala Dinas PP PA/Masyarakat/Korban
Kepala Daerah /Kepala Dinas PP PA/Masyarakat/Anak
Kepala Daerah /Kepala Dinas PP PA/Masyarakat/Anak
1 Selatan

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Pemda
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategi
Sasaran Strategi

Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Prov. Sumsel
2026
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Urusan Pemerintahan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Pelaksanaan	OPD Prov dan Kab/Kota belum responsif PUG	ROO.26.08.12.01	DPPPA	Komitmen dan pemahaman rendah	Internal	C	Target jumlah OPD terdampingi tidak tercapai; kualitas perencanaan	OPD Provinsi & Kab/Kota
2	Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Pelaksanaan	Partisipasi peserta rendah	ROO.26.08.12.02	DPPPA	Sosialisasi kurang efektif, jadwal tidak tepat	Internal	C	Jumlah SDM penerima sosialisasi tidak tercapai	Lembaga masyarakat & perempuan
3	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Pelaksanaan	Peserta tidak memenuhi kriteria/target	ROO.26.08.12.03	DPPPA	Data sasaran tidak akurat	Internal dan Eksternal	C	Output pelatihan tidak optimal	SDM lembaga & perempuan potensia
4	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pelaksanaan	Lembaga belum aktif/kurang siap	ROO.26.08.12.04	DPPPA	Keterbatasan SDM & anggaran lembaga	Eksternal	UC	Jumlah lembaga terdampingi tidak tercapai	SDM Lembaga
5	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Pelaksanaan	Kurangnya dukungan lintas sektor	ROO.26.08.12.05	DPPPA	Koordinasi belum optimal	Eksternal	UC	Penguatan kelembagaan tidak maksimal	Lembaga perempuan
6	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Pelaksanaan	Komitmen pemangku kepentingan rendah	ROO.26.08.12.06	DPPPA	Minimnya pemahaman urgensi isu	Internal	C	Upaya pencegahan tidak efektif	Pemangku kebijakan provinsi, Kab/Kota,
7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Korban enggan melapor	ROO.26.08.12.07	DPPPA	Stigma sosial & rasa takut	Ekstrenal	UC	Jumlah korban terlayani rendah	Korban dan keluarga
8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaporan	Sistem pengaduan tidak optimal	ROO.26.08.12.08	DPPPA	Sarana prasarana terbatas	Internal	C	Kasus tidak tertangani cepat	Korban dan keluarga
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Pelaksanaan	SDM tidak mengikuti pelatihan secara penuh	ROO.26.08.12.09	DPPPA	Beban kerja tinggi	Internal	C	Kompetensi tidak meningkat signifikan	DPPPA/ SDM DPPPA
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Pelaksanaan	Lembaga tidak aktif pasca pelatihan	ROO.26.08.12.10	DPPPA	Tidak ada monitoring lanjutan	Internal	C	Output tidak berkelanjutan	DPPPA/ SDM DPPPA

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
11	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan bimbingan	ROO.26.08.12.11	DPPPA	Kurangnya sosialisasi dan minat masyarakat	Internal & Eksternal	UC	Target jumlah keluarga tidak tercapai	Masyarakat, DPPPA
12	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Pelaksanaan	Data tidak akurat atau tidak terinput tepat waktu	ROO.26.08.12.12	DPPPA	SDM terbatas dan kurangnya pemahaman aplikasi	Internal	C	Data tidak valid untuk perencanaan kebijakan	DPPPA, Pemerintah Daerah
13	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Pelaksanaan	Ketersediaan data tidak lengkap	ROO.26.08.12.13		Koordinasi lintas OPD kurang optimal	Eksterna;	UC	Perencanaan program tidak berbasis data	DPPPA, OPD terkait
14	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan	Rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan	ROO.26.08.12.14	DPPPA	Kurangnya komitmen dan kesadaran stakeholder	Eksternal	UC	Kebijakan tidak terimplementasi optimal	Anak, Pemerintah Daerah
15	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Pelaksanaan	Penyebaran informasi tidak efektif	ROO.26.08.12.15	DPPPA	Media komunikasi tidak tepat sasaran	Internal	C	Masyarakat kurang memahami hak anak	Masyarakat, Anak
16	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Pelaksanaan	Peserta advokasi tidak sesuai target	ROO.26.08.12.16	DPPPA	Perencanaan peserta kurang matang	Internal	C	Pencegahan kekerasan tidak efektif	Masyarakat, Pemerintah
17	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Korban tidak mendapatkan pendampingan optimal	ROO.26.08.12.17	DPPPA	Keterbatasan tenaga pendamping	Internal	C	Pemulihan korban tidak maksimal	Anak (korban)
18	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Kasus tidak terjangkau atau tidak dilaporkan	ROO.26.08.12.18	DPPPA	Kurangnya akses layanan dan stigma masyarakat	Eksternal	UC	Kasus kekerasan tidak tertangani	Anak (korban), masyarakat
19	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelaksanaan	SDM tidak mengalami peningkatan kapasitas signifikan	ROO.26.08.12.19	DPPPA	Pelatihan tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Kualitas layanan tidak meningkat	Lembaga layanan, penerima manfaat

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	Resiko Strategis				
1	PPRG tidak diterapkan secara konsisten	RSO.26.08.12.01	4	3	12
2	Data terpilah tidak tersedia/ tidak mutakhir	RSO.26.08.12.02	3	3	9
3	Akses perempuan ke lapangan kerja formal rendah	RSO.26.08.12.03	3	3	9
4	Akses perempuan ke modal usaha terbatas	RSO.26.08.12.04	3	3	9
5	Indikator KLA tidak tercapai	RSO.25.08.12.05	4	3	12
6	Forum Anak tidak berfungsi optimal	RSO.25.08.12.06	4	3	12
7	Kasus tidak tertangani sesuai standar layanan	RSO.26.08.12.07	3	4	12
8	Korban enggan melapor	RSO.26.08.12.08	3	4	12
9	Layanan rehabilitasi ABH tidak optimal	RSO.25.08.12.09	3	3	9
10	Kasus tidak teridentifikasi	RSO.25.08.12.10	3	3	9
2	Resiko Operasional DPPPA				
1	OPD Prov dan Kab/Kota belum responsif PUG	ROO.26.08.12.01	3	3	9
2	Partisipasi peserta rendah	ROO.26.08.12.02	3	3	9
3	Peserta tidak memenuhi kriteria/target	ROO.26.08.12.03	3	3	9
4	Lembaga belum aktif/kurang siap	ROO.26.08.12.04	3	3	9
5	Kurangnya dukungan lintas sektor	ROO.26.08.12.05	4	3	12
6	Komitmen pemangku kepentingan rendah	ROO.26.08.12.06	4	3	12
7	Korban enggan melapor	ROO.26.08.12.07	3	4	12
8	Sistem pengaduan tidak optimal	ROO.26.08.12.08	3	4	12
9	SDM tidak mengikuti pelatihan secara penuh	ROO.26.08.12.09	3	3	9
10	Lembaga tidak aktif pasca pelatihan	ROO.26.08.12.10	3	3	9
11	Rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan bimbingan	ROO.26.08.12.11	3	3	9
12	Data tidak akurat atau tidak terinput tepat waktu	ROO.26.08.12.12	4	3	12
13	Ketersediaan data tidak lengkap	ROO.26.08.12.13	4	3	12
14	Rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan	ROO.26.08.12.14	4	3	12
15	Penyebaran informasi tidak efektif	ROO.26.08.12.15	3	3	9
16	Peserta advokasi tidak sesuai target	ROO.26.08.12.16	3	3	9
17	Korban tidak mendapatkan pendampingan optimal	ROO.26.08.12.17	4	3	12
18	Kasus tidak terjangkau atau tidak dilaporkan	ROO.26.08.12.18	3	4	12
19	SDM tidak mengalami peningkatan kapasitas signifikan	ROO.26.08.12.19	3	3	9

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Resiko Strategis					
1	Kurangnya dukungan lintas sektor	RSO.26.08.12.01	12	DPPPA	Pemahaman OPD rendah, komitmen pimpinan bervariasi	Program tidak responsif gender, target PUG tidak tercapai
2	Komitmen pemangku kepentingan rendah	RSO.25.08.12.05	12	DPPPA	Koordinasi OPD belum optimal	Predikat KLA menurun
3	Korban enggan melapor	RSO.25.08.12.06	12	DPPPA	Pembinaan terbatas	Aspirasi anak tidak terserap
4	Sistem pengaduan tidak optimal	RSO.26.08.12.07	12	DPPPA	SDM terbatas, koordinasi lemah	Korban tidak terlindungi optimal
5	Korban enggan melapor	RSO.26.08.12.08	12	DPPPA	Stigma, minim sosialisasi	Kasus tersembunyi
	Resiko Operasional					
6	OPD Prov dan Kab/Kota belum responsif PUG	ROO.26.08.12.05	12	DPPPA	Koordinasi belum optimal	Penguatan kelembagaan tidak maksimal
7	Kurangnya dukungan lintas sektor	ROO.26.08.12.06	12	DPPPA	Minimnya pemahaman urgensi isu	Upaya pencegahan tidak efektif
8	SDM tidak mengikuti pelatihan secara penuh	ROO.26.08.12.07	12	DPPPA	Stigma sosial & rasa takut	Jumlah korban terlayani rendah
9	Lembaga tidak aktif pasca pelatihan	ROO.26.08.12.08	12	DPPPA	Sarana prasarana terbatas	Kasus tidak tertangani cepat
10	Data tidak akurat atau tidak terinput tepat waktu	ROO.26.08.12.12	12	DPPPA	SDM terbatas dan kurangnya pemahaman aplikasi	Data tidak valid untuk perencanaan kebijakan
11	Ketersediaan data tidak lengkap	ROO.26.08.12.13	12	DPPPA	Koordinasi lintas OPD kurang optimal	Perencanaan program tidak berbasis data
12	Rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan	ROO.26.08.12.14	12	DPPPA	Kurangnya komitmen dan kesadaran stakeholder	Kebijakan tidak terimplementasi optimal
13	Korban tidak mendapatkan pendampingan optimal	ROO.26.08.12.17	12	DPPPA	Keterbatasan tenaga pendamping	Pemulihan korban tidak maksimal
14	Kasus tidak terjangkau atau tidak dilaporkan	ROO.26.08.12.18	12	DPPPA	Kurangnya akses layanan dan stigma masyarakat	Kasus kekerasan tidak tertangani

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
2025
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Kurangnya dukungan lintas sektor	RSO.26.08.12.01	Koordinasi lintas OPD melalui rapat	Belum rutin & tidak terstruktur	Membentuk forum koordinasi lintas sektor & jadwal rutin	PUG dan PP	Triwulan II 2026
2	Komitmen pemangku kepentingan rendah	RSO.25.08.12.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Belum menyentuh level pengambil keputusan	Penguatan advokasi kepada pimpinan (kepala daerah/OPD)	TKA	Triwulan II 2026
3	Korban enggan melapor	RSO.25.08.12.06	Layanan pengaduan tersedia	Sosialisasi layanan masih terbatas	Kampanye masif & pendekatan berbasis komunitas	UPTD PPA	Triwulan III 2026
4	Sistem pengaduan tidak optimal	RSO.26.08.12.07	Tersedia kanal pengaduan	Sarana prasarana terbatas	Penguatan sistem digital & peningkatan sarana prasarana	UPTD PPA	Triwulan II 2026
5	Korban enggan melapor	RSO.26.08.12.08	Layanan penjangkauan korban	Penjangkauan belum maksimal	Penguatan jejaring relawan & mitra lapangan	UPTD PPA	Triwulan III 2026
6	OPD Prov dan Kab/Kota belum responsif PUG	ROO.26.08.12.05	Pendampingan PUG sudah dilakukan	Belum semua OPD terjangkau	Pendampingan intensif & monitoring evaluasi PUG	PUG dan PP	Triwulan IV 2026
7	Kurangnya dukungan lintas sektor	ROO.26.08.12.06	Koordinasi program	Komitmen belum kuat	Penyusunan MoU/PKS lintas sektor	PPA	Triwulan III 2026
8	SDM tidak mengikuti pelatihan secara penuh	ROO.26.08.12.07	Pelatihan sudah dilaksanakan	Tidak ada kontrol kehadiran	Penegasan kewajiban & monitoring kehadiran peserta	UPTD PPA	Triwulan II 2026
9	Lembaga tidak aktif pasca pelatihan	ROO.26.08.12.08	Pelatihan peningkatan kapasitas	Tidak ada tindak lanjut	Monitoring pasca pelatihan & coaching	UPTD PPA	Triwulan III 2026
10	Data tidak akurat atau tidak terinput tepat waktu	ROO.26.08.12.12	Penginputan Simfoni PPA	SDM belum kompeten	Bimtek aplikasi & validasi data berkala	DATA	Triwulan II 2026
11	Ketersediaan data tidak lengkap	ROO.26.08.12.13	Pengumpulan data dari OPD	Koordinasi lemah	Penguatan koordinasi & integrasi data lintas OPD	DATA	Triwulan III 2026
12	Rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan	ROO.26.08.12.14	Sosialisasi kebijakan	Tidak berkelanjutan	Pelibatan aktif stakeholder dalam forum/FGD	TKA	Triwulan III 2026
13	Korban tidak mendapatkan pendampingan optimal	ROO.26.08.12.17	Layanan pendampingan tersedia	SDM terbatas	Penambahan tenaga pendamping & pelatihan	UPTD PPA	Triwulan IV 2026
14	Kasus tidak terjangkau atau tidak dilaporkan	ROO.26.08.12.18	Layanan pengaduan tersedia	Akses & stigma tinggi	Sosialisasi, hotline, dan layanan jemput bola	UPTD PPA	Triwulan III 2026

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Membentuk forum koordinasi lintas sektor & jadwal rutin	Rapat, surat undangan, notulen	DPPPA	OPD, instansi terkait	TW II	2026	Rutin triwulan
2	Penguatan advokasi kepada pimpinan (kepala daerah/OPD)	Audiensi, paparan, policy brief	DPPPA	Kepala daerah, pimpinan OPD	TW II	2026	Prioritas
3	Kampanye masif & pendekatan berbasis komunitas	Media sosial, leaflet, sosialisasi	DPPPA	Masyarakat	TW III	2026	Kolaboratif
4	Penguatan sistem digital & peningkatan sarana prasarana	Aplikasi, website, hotline	DPPPA	Masyarakat	TW II	2026	Digitalisasi
5	Penguatan jejaring relawan & mitra lapangan	FGD, koordinasi, grup WA	DPPPA	LSM, relawan	TW III	2026	Berkelanjutan
6	Pendampingan intensif & monitoring evaluasi PUG	Bimtek, monitoring, laporan	DPPPA	OPD	TW IV	2026	Berkala
7	Penyusunan MoU/PKS lintas sektor	Dokumen MoU, rapat koordinasi	DPPPA	OPD, mitra	TW III	2026	Formalisasi
8	Penegasan kewajiban & monitoring kehadiran peserta	Absensi, laporan kegiatan	DPPPA	Peserta pelatihan	TW II	2026	Pengawasan
9	Monitoring pasca pelatihan & coaching	Kunjungan, coaching, laporan	DPPPA	Lembaga	TW III	2026	Tindak lanjut
10	Bimtek aplikasi & validasi data berkala	Pelatihan, aplikasi, dashboard	DPPPA	Operator data	TW II	2026	Kualitas data
11	Penguatan koordinasi & integrasi data lintas OPD	Rapat koordinasi, sistem data	DPPPA	OPD terkait	TW III	2026	Satu data
12	Pelibatan aktif stakeholder dalam forum/FGD	FGD, rapat, notulen	DPPPA	Stakeholder	TW III	2026	Partisipatif
13	Penambahan tenaga pendamping & pelatihan	Rekrutmen, pelatihan	DPPPA	Tenaga pendamping	TW IV	2026	Penguatan SDM
14	Sosialisasi, hotline, dan layanan jemput bola	Hotline, media sosial, kunjungan	DPPPA	Masyarakat	TW III	2026	Akses layanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001

RENCANA DAN REALISASI ATAS KEGIATANPENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan
2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan PerlindunganAnak
Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk / Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Membentuk forum koordinasi lintas sektor & jadwal rutin	Evaluasi rapat & notulen	DPPPA	TW II–IV	2026	Berkala
2	Penguatan advokasi kepada pimpinan (kepala daerah/OPD)	Laporan kegiatan & tindak lanjut	DPPPA	TW II–III	2026	Prioritas
3	Kampanye masif & pendekatan berbasis komunitas	Monitoring jangkauan & partisipasi	DPPPA	TW III–IV	2026	Kolaboratif
4	Penguatan sistem digital & peningkatan sarana prasarana	Uji fungsi sistem & laporan layanan	DPPPA	TW II–IV	2026	Digital
5	Penguatan jejaring relawan & mitra lapangan	Evaluasi aktivitas & laporan mitra	DPPPA	TW III–IV	2026	Berkelanjutan
6	Pendampingan intensif & monitoring evaluasi PUG	Monitoring capaian & laporan OPD	DPPPA	TW III–IV	2026	Berkala
7	Penyusunan MoU/PKS lintas sektor	Review dokumen & implementasi	DPPPA	TW III	2026	Formal
8	Penegasan kewajiban & monitoring kehadiran peserta	Rekap absensi & evaluasi peserta	DPPPA	TW II–III	2026	Pengawasan
9	Monitoring pasca pelatihan & coaching	Kunjungan lapangan & laporan	DPPPA	TW III–IV	2026	Tindak lanjut
10	Bimtek aplikasi & validasi data berkala	Audit data & monitoring aplikasi	DPPPA	TW II–IV	2026	Kualitas data
11	Penguatan koordinasi & integrasi data lintas OPD	Evaluasi sistem & rapat koordinasi	DPPPA	TW III–IV	2026	Satu data
12	Pelibatan aktif stakeholder dalam forum/FGD	Evaluasi hasil FGD & partisipasi	DPPPA	TW III	2026	Partisipatif
13	Penambahan tenaga pendamping & pelatihan	Evaluasi kinerja & laporan SDM	DPPPA	TW IV	2026	SDM
14	Sosialisasi, hotline, dan layanan jemput bola	Monitoring jumlah layanan & laporan	DPPPA	TW III–IV	2026	Akses layanan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Muhammad Zaki Aslam, SIP.,M.Si
Pembina Utama Madya, (IV/d)
NIP.197306261993111001
